

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI,
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, NORMA
SUBJEKTIF DAN KONTROL PERILAKU TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Batang)

RR. DWITA INDAH CAHYANI
Pembimbing : Alek Murtin, S.E., M.Si., Ak., CA

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar
Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, 55183 Telp 0274 387656,
Indonesia
E-mail address : dwitaindahcahyani@gmail.com

ABSTRACT

This research intended to examine and analyze Tax Audit, Technology And Information, Possibility Of Fraud Detection, Subjective Norms And Behavioral Control Toward The Taxpayer's Perception Of The Ethics Of Tax Evasion. The population in this study is the tax payer listed on KPP Pratama Batang. Sample were selected using convenience sampling method. Sample in this study amounted used is by using a questionnaire. The analytical method used is multiple linier regression. Test the quality of the data using validity and reliability test. Hypothesis test uses adjusted R Square an t-test. Based on the analysis that has been done, the result that 1) Tax audit negative and significant effect on tax evasion, 2) Technology And Information negative and significant effect on tax evasion, 3) Possibility Of Fraud Detection is not effect on tax evasion, 4) subjective norm positive and significant effect on tax evasion, 5) behavioral control positive and significant effect on tax evasion.

Keywords: *Tax Audit, Technology And Information, Possibility Of Fraud Detection, Subjective Norms And Behavioral Control*

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi yang berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai sektor, khususnya di bidang perekonomian,

Negara Indonesia dituntut agar mampu mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Sebagai

Negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber berasal dari sektor perpajakan, dimana pajak diandalkan menjadi komponen terbesar atas pendapatan Negara.

Penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan Negara. Namun penerimaan yang tergolong cukup besar tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Bila setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat bukan berkurang sebab jumlah Wajib Pajak potensial cenderung bertambah setiap tahunnya (Nugroho, 2012). Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas perpajakan di Indonesia, baik dari segi sistem maupun sumber daya manusianya.

Masih banyak ditemukan Wajib pajak yang bekerja sama terhadap petugas pajak, kerja sama tersebut dilakukan guna meringankan beban pajak mereka. Selain itu juga banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Dan timbulah juga perilaku dari Wajib Pajak untuk tidak membayarkan beban dari pajak terutang. Kemudian Wajib

Pajak mulai beranggapan bahwa Pratik penggelapan pajak ini etik untuk dilakukan (Suminarsasi, 2011).

Penyebab utama yang mendorong Wajib Pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan, pengetahuan dan kompetensi yang luas untuk mengetahui seluruh peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menemukan celah untuk mengurangi biaya pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dalam penelitiannya, Rahman (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan yang sebenar-benarnya (tidak jujur), maupun menyembunyikan data keuangan.

Dalam penelitiannya, Rahman (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan

tindakan melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan yang sebenarnya (tidak jujur), maupun menyembunyikan data keuangan.

Pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, dikenakan pada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dengan memperhatikan prinsip peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari (Suandy, 2008).

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini yang awalnya dinamai *Theory of Reasoned Action (TRA)*, dikembangkan di tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan pada *model reasoned action* yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai *Theory of Planned Behavior (TPB)*, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA (Achmat, 2010).

Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi teori ini, yang

pertama yaitu *behavioral belief*, merupakan suatu keyakinan akan hasil dari perilaku atau penilaian terhadap perilaku itu sendiri, *behavioral belief* ini sendiri yang nantinya akan membentuk suatu variabel sikap (*attitude*). Kedua yaitu *normative belief*, merupakan keyakinan suatu individu terhadap harapan normative individu itu sendiri atau orang lain yang menjadi referensi misalnya seperti keluarga, teman dan atau konsultan pajak yang bertugas untuk menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku yang diberikan. Faktor yang kedua ini akan membentuk suatu variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Faktor yang ketiga yaitu *control belief*, merupakan keyakinan suatu individu yang didasarkan atas pengalamannya dimasa lampau dengan perilaku.

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu

yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Etika

Menurut Maryani dan Ludigdo (2001) etika merupakan rangkaian aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan menurut Sukrisno (2009) banyak teori etika yang sudah berkembang, sehingga harus dibuat perbedaan secara garis besar.

Bahwa etika merupakan tata cara seseorang dalam mengatur perilaku mereka. Sedangkan etika dalam perpajakan adalah peraturan didalam lingkup dimana seseorang maupun kelompok yang menjalani kehidupan didalam kehidupan

perpajakan itu sendiri dan tentang bagaimana mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gunawan, 2016).

Penggelapan pajak

Pelanggaran pajak merupakan usaha yang dapat dilakukan guna meminimalkan beban pajak terutang seorang wajib pajak, dengan cara melakukan pelanggaran undang-undang. Penggelapan pajak dikatakan melanggar Undang-undang karena dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pihak fiskus yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. tindakan tersebut merupakan bentuk perlawanan penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak sendiri merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh terhadap Undang-undang perpajakan (Rahayu, 2010).

Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa kecurangan yang dia lakukan memiliki persentase kemungkinan dapat dideteksi yang berarti tidak melakukan penggelapan pajak. Menurut Ayu (2011) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan

perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa variabel intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis adalah sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Teknologi dan Informasi perpajakan

Modernisasi layanan dalam perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga nantinya diharapkan wajib pajak akan membayarkan pajak terutang dengan mudah karena dengan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. dengan adanya teknologi dan informasi di bidang perpajakan ini, waktu yang dibutuhkan seseorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015).

Menurut Permatasari (2013) dan Ardyaksa (2014) dalam penelitian bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Jika teknologi dan

informasi dari pemerintah semakin baik maka seorang wajib pajak juga semakin beretika dan sehingga membuat tingkat dari penggelapan pajak tersebut semakin rendah dalam melakukan tindakan penggelapan pajak, Silaen (2015). Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis adalah sebagai berikut:

H2 : Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Pemeriksaan pajak ini erat kaitannya dengan suatu perilaku yang cenderung melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka akan semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada (Sari, 2015).

Penelitian Ayu (2011) juga menemukan hal yang sama, yaitu bahwa persepsi kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak. Namun hal ini tidak mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang mengindikasikan bahwa meskipun

pemeriksaan pajak diperketat, dan jika masih ada oknum pajak yang dapat disuap, maka wajib pajak akan dapat dengan mudah dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis adalah sebagai berikut:

H3 : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Norma Subjektif

Norma Subjektif Adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1988). Menurut Marhaini (2008) mengatakan, dalam teori ini perilaku seseorang tergantung niat, kemudian niat dalam berperilaku tergantung dari sikap (attitude) dan norma subyektif. Di sisi lain, keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi akan menentukan perilaku. Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma subyektif. Teori mengenai sikap dan Norma subyektif juga disebut sebagai Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang dikenalkan oleh Fishbein dan Ajzen.

Mustikari (2007) menemukan bahwa pengaruh orang sekitar atau tekanan sosial yang kuat akan mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Sedangkan hasil penelitian

Hidayat dan Nugroho (2010) menunjukkan tekanan sosial disekitar Wajib Pajak adalah untuk patuh, maka niat Wajib Pajak tersebut akan cenderung untuk patuh juga terhadap penggelapan pajak. Yang dimana bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis adalah sebagai berikut:

H4 : Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kontrol Perilaku

Variabel ini mengarah kepada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan suatu perilaku yang diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman dimasa lampau seperti halangan, rintangan dan yang dapat diantisipasi. Variabel ini terbentuk dari *control belief*. (Ajzen, 1991). Semakin baik niat perilaku seseorang dalam melakukan kewajiban dalam membayarkan kewajiban perpajakannya maka kontrol perilaku juga akan baik. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan merupakan seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti halnya melaporkan penghasilannya lebih rendah (Pangestu dan Rusmana, 2012).

Menurut Meutia et al (2013) semakin banyak sumber daya dan kesempatan yang dimiliki, dan semakin sedikit hambatan yang dapat diantisipasi, maka semakin besar kontrol yang dipersepsikan individu atas perilaku sehingga individu berniat untuk melakukan perilaku tersebut. Mustikasari (2007) mengatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku dan niat untuk melakukan penggelapan pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5 : Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Model penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Kota Batang sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batang.

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat Kuantitatif dimana jenis data yang digunakan menggunakan data primer yang dimana data yang hanya bisa kita dapatkan dari sumber asli, data primer juga harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat yang kita jadikan sebagai responden dalam penelitian.

Data primer diperoleh dari kuesioner yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP pratama Kota Batang.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang artinya adalah teknik sampling *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri atau kriteria khusus, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Skala Pengukuran

Pengumpulan data menggunakan kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis lebih dari satu variabel independen. Pertanyaan yang berada dalam kuesioner disusun dengan menggunakan format skala likert 1-5 point yang digunakan peneliti untuk mengukur sikap maupun persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi.

Definisi Operasional Variabel Dependen dan Variabel Independen

Variabel Penggelapan Pajak

Variabel penggelapan pajak diukur menggunakan Indikator yang terdiri dari 6 poin pertanyaan yang mengacu pada penelitian suminarsasi (2011). Indikator penelitian tersebut adalah

1. Perlakuan penggelapan pajak jika tariff yang diperlakukan terlalu tinggi.
2. Pajak yang di dapat tidak dikelola untuk kepentingan umum.
3. Manfaat yang diterima Wajib Pajak atas pajak yang dibayarkan.
4. Hukum mengenai perpajakan lemah.
5. Adanya diskriminasi dalam perhitungan perpajakan.
6. Kinerja yang buruk dari aparat pajak dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pajak.

Pemeriksaan pajak

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang terdiri

dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Ardian dan Pratomo (2015). Indikator nya adalah:

1. Pemeriksaan pajak perlu karena untuk menguji apakah Wajib Pajak patuh terhadap pajak.
2. Pemeriksaan khusus dilakukan apabila adanya dugaan tentang pajak.
3. Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan baik.
4. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan rutin dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak

Teknologi dan Informasi perpajakan

Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan menggunakan 4 indikator sesuai penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Friskianti dan Handayani (2014), dan Silaen (2015). Indikator tersebut adalah:

1. Ketersediaan teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem dari perpajakan.
2. Teknologi dan Informasi yang memadai sesuai kebutuhan Wajib Pajak.
3. Informasi yang mudah di akses.
4. Pemanfaatan fasilitas Teknologi dan Informasi.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan

Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan 3 indikator yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) Ayu (2009), Ayu (2011), serta Rahman (2013). Indikator tersebut adalah:

1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hokum

2. Diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan
3. Tingkat kejujuran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

Norma subjektif

Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Mustikasari (2007). Indikator tersebut adalah:

1. Teman-teman atau rekan seprofesi mendorong untuk mematuhi ketentuan pajak.
- 2.) Biasanya WP mengikuti saran dari teman maupun rekan satu profesi,
- 3.) Konsultan pajak memberi saran dan dorongan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
- 4.) Wajib Pajak tidak bisa mengikuti saran dari konsultan pajak
5. Petugas pajak memberikan saran dan dorongan untuk melakukan kewajiban pajak.
- 6.) Biasanya Wajib Pajak mengikuti saran dan dorongan dari petugas pajak.

Kontrol perilaku

Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Mustikasari (2007). Indikator tersebut adalah:

- 1.) Fiskus sering melakukan pemeriksaan pajak
- 2.) Sulit bagi WP untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan karena fiskus sering melakukan pemeriksaan
- 3.) Sanksi perpajakan diterapkan dengan baik
- 4.) Sulit untuk melanggar peraturan pajak karena kemungkinan

akan dikenakan sanksi, 5.) Pihak ketiga dapat melaporkan wajib pajak. 6.) Sangat sulit untuk melanggar peraturan pajak karena kemungkinan dapat dilaporkan oleh pihak ketiga.

Uji Kualitas Instrumen Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan juga daftar demografi responden. Metode ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Adalah untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas didalam penelitian ini adalah menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan. Untuk mengukur validitas setiap item pertanyaan harus dibandingkan nilai r hitung dan r tabel nya. Tiap item pertanyaan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung diperoleh dari *Pearson Correlation*, sedangkan r tabel diperoleh dari Tabel *Product Moment Correlation* ($\alpha = 0,05$) (Sekaran, 2000).

Kuesioner dikatakan valid apabila nilai masing-masing variabel memiliki korelasi (r) sebesar $\geq 0,05$ (Ghazali, 2013).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dan konstruk atau variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006).

Uji Asumsi klasik

Uji normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel pengganggu atau residualnya memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini dilihat dengan menggunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 berarti dapat dikatakan data normal.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Pengujian ini dilihat dari besaran dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel

independen lainnya.. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas. Nilai *cut off yang* umum dapat dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10 (Ghozali, 2013).

Uji heterokedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas (Ghozali, 2013).

Uji Hipotesis Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu model yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Uji statistik F

Uji statistik ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud di dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan cara jika nilai sig < alpha 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

Uji statistik t

Uji statistic t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji ini digunakan untuk menjawab hipotesis. Kriteria hipotesis diterima adalah jika nilai sig < alpha 0,05 dan sebaliknya jika nilai sig > alpa 0,05 maka hipotesis tidak diterima.

Koefisien determinasi (Adjusted R²)

Besar koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1, semakin mendekati nol maka besarnya koefisien determinasi maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan juga sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Peneliti menyebar 110 kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling. Namun terdapat 6 kuesioner yang tidak diisi lengkap oleh responden. Jadi total kuesioner yang

dapat diolah oleh peneliti adalah 104 kuesioner dengan persentase 94,54%.

Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 104 responden dengan taraf signifikansi 0,05 (alpha 5%). Didapat rtabel = 0,191. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid r-hitung > rtabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan setelah seluruh instrument telah dilakukan uji validitas dan sudah teruji validitasnya. Dalam uji ini setiap instrument akan dinilai seberapa tingkat konsistensinya dengan teknik pengukuran menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.

Tabel 1

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbac h's Alpa	N of Items	Keterangan
PP	0,839	6	Reliabel
PMP	0,844	4	Reliabel
TI	0,836	4	Reliabel
KTK	0,754	6	Reliabel
NS	0,877	6	Reliabel
KP	0,854	5	Reliabel

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa telah dilakukan uji reliabilitas pada setiap instrument yang menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha*

variabel penggelapan pajak sebesar 0,839, variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,844, variabel teknologi dan informasi sebesar 0,836, variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 0,754, variabel norma subjektif sebesar 0,877, dan variabel control perilaku sebesar 0,854.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji ini adalah pengujian pertama kali yang dilakukan dalam analisis statistic untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig.	Ket
Unstandardized Residual	0.637	Berdistribusi Normal

Pada tabel menunjukkan bahwa nilai asymp Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,637 > alpha 0,05, karena nilai sig lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas ketika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflasi Factor* (VIF) kurang dari 10 yang dilihat dari hasil regresi berganda.

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Ket
	Tolerance	VIF	
PMP	0,635	1,575	Tidak terjadi multikolinearitas
TI	0,625	1,600	Tidak terjadi multikolinearitas
KTK	0,875	1,143	Tidak terjadi multikolinearitas
NS	0,533	1,877	Tidak terjadi multikolinearitas
KP	0,501	1,997	Tidak terjadi multikolinearitas

Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa VIF masing-masing variabel memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,1. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,575 dan

nilai tolerance sebesar 0,635. Variabel teknologi dan informasi memiliki nilai VIF sebesar 1,600 dan nilai tolerance 0,625. Variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki nilai VIF sebesar 1,143 dan nilai tolerance sebesar 0,875. Variabel norma subjektif memiliki nilai VIF sebesar 1,877 dan nilai tolerance 0,533. Variabel Kontrol Perilaku memiliki nilai VIF sebesar 1,997 dan nilai tolerance 0,501. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada data masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Uji yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas ini adalah uji gletser yang dilihat dari nilai signifikansi diatas 0,05.

Tabel 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Ket
PMP	0,624	Tdk terjadi heteroskedastisitas
TI	0,702	Tdk terjadi heteroskedastisitas
KTK	0,875	Tdk terjadi heteroskedastisitas
NS	0,288	Tdk terjadi heteroskedastisitas
KP	0,355	Tdk terjadi heteroskedastisitas

Pada Tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari alpha 0,05. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai sig sebesar 0,624, variabel teknologi dan informasi memiliki nilai sig sebesar 0,702, variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki nilai sig sebesar 0,875, variabel norma subjektif memiliki nilai sig sebesar 0,288, dan variabel control perilaku memiliki nilai sig sebesar 0,355. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, norma subjektif dan control perilaku terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dijelaskan

pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

Hasil Uji Regresi

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat

Variabel	Koef Regresi	T	Sig.	Keterangan
Konstanta	20,102	4,396	,000	Signifikan
PMP	-,270	-2,337	,021	Signifikan
TI	-,246	-2,089	,039	Signifikan
KTK	-,089	-,873	,385	Tidak Signifikan
NS	,195	2,095	,039	Signifikan
KP	,429	3,665	,000	Signifikan

dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 20,102 - 0,270 (PMP) - 0,246 (TI) - 0,89 (KTK) + 0,195 (NS) + 0,429 (KP) + e$$

Berdasarkan analisis Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh kearah

negative pada penggelapan pajak. Sedangkan variabel norma subjektif dan control perilaku memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Hasil Uji F

Uji F (Simultan) bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Hasil Uji Nilai F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	593.462	5	118.692	23.307	0.000 ^b
	Residual	499.067	98	5.093		
	Total	1092.529	103			

Pada Tabel menunjukkan bahwa hasil nilai F sebesar 23,307 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, norma subjektif dan kotrol perilaku) berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen penggelapan pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Nilai t digunakan untuk menjawab hipotesis. Kriteria hipotesis diterima adalah jika nilai sig < alpha 0,05 dan sebaliknya jika nilai sig > alpha 0,05 maka hipotesis tidak diterima. Hasil uji t terdapat pada tabel berikut:

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 1)

Berdasarkan Tabel 4.15

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.102	4.573		4.396	.000
	Pemeriksaan Pajak	-.270	.115	-.200	-2.337	.021
	Teknologi dan Informasi	-.246	.118	-.180	-2.089	.039
	Kemungkinan terdeteksinya kecurangan	-.089	.102	-.064	-.873	.385
	Norma subjektif	.195	.093	.196	2.095	.039
	Kontrol perilaku	.429	.117	.354	3.665	.000

menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap etika penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel pemeriksaan pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,021 dan nilai koefisien sebesar -0,270. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemeriksaan pajak adalah sig

(0,021) < α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **diterima**.

Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 2)

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua tentang pengaruh teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel teknologi dan informasi memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039 dan nilai koefisien adalah sebesar -0,246. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel teknologi dan informasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel teknologi dan informasi adalah sig (0,039) < α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **diterima**.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 3)

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,385 dan

nilai koefisien adalah sebesar -0,089. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah $\text{sig} (0,385) > \alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **ditolak**.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 4)

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis keempat tentang pengaruh norma subjektif terhadap penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel norma subjektif memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039 dan nilai koefisien adalah sebesar 0,195. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel norma subjektif adalah $\text{sig} (0,039) < \alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat **diterima**.

Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Hipotesis 5)

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kelima tentang pengaruh

kontrol perilaku terhadap penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel control perilaku memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien adalah sebesar 0,429. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel control perilaku adalah $(0,000) < \alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima **diterima**.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen, dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*). Hasil *Adjusted R²* dapat dilihat pada tabel berikut:

Pada Tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi *Adjusted R Square* sebesar 0,520. Hal tersebut berarti mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.520	2.257

terdeteksinya kecurangan, norma subjektif dan control perilaku mempunyai hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,520 atau 52%, sedangkan 48% lainnya ditentukan oleh

faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut terdapat 104 Wajib Pajak yang menjadi responden. Data yang didapat dari responden tersebut kemudian diolah dan dianalisis yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, maka tingkat Wajib Pajak untuk menggelapkan pajaknya semakin kecil atau rendah dan Wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap pembayaran pajak dan peraturan perpajakan.

2. Teknologi dan Informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut berarti semakin tinggi teknologi dan informasi yang dirasakan oleh Wajib Pajak maka tingkat Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak semakin kecil atau rendah dan Wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap pembayaran pajak dan peraturan perpajakan.

3. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Ketika dari seseorang menganggap bahwa persentase

kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi, maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan, meskipun pemeriksaan pajak diprketat dan jika masih ada oknum yang mudah disuap, maka wajib pajak akan dapat dengan mudah melakukan tindakan penggelapan pajak.

4. Norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut berarti norma subjektif sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Karena menunjukkan tekanan social disekitar wajib pajak untuk patuh terhadap aturan membayar tangguhan setiap bulannya dan akan cenderung tidak akan melakukan penggelapan pajak.

5. Kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal tersebut berarti control perilaku sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Karena menunjukkan tekanan social disekitar wajib pajak untuk patuh terhadap aturan membayar tangguhan setiap bulannya dan akan cenderung tidak akan melakukan penggelapan pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, norma

subjektif dan control perilaku merupakan faktor penting dalam mengurangi penggelapan pajak, maka dari itu perlu dilakukan analisa lebih dalam dan lanjut guna adanya perbaikan yang lebih baik kedepannya. Berikut merupakan beberapa saran yang peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambah jumlah variabel independen yang memungkinkan dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti sistem perpajakan, saksi pajak, tariff pajak, religiusitas, diskrimnasi, dan keadilan pajak.

2. Menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian sehingga data yang diperoleh dari responden dapat mendukung secara kuat hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti.

3. Menambahkan metode pengumpulan data, tidak hanya dengan penyebaran kuesioner tetapi dapat juga melakukan wawancara kepada responden secara langsung.

KETERBATASAN PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti sangat menyadari banya kkekurangan dan kendala yang terdapat selama dilakukan penelitian, baik dari faktok internal maupun eksternal. Keterbatasan penelitian yang terjadi diantaranya:

1. Tempat penelitian terlalu sempit dan jumlah responden sedikit, yakni hanya di satu KPP Pratama. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian yang nantinya dapat mendukung penelitian yang lebih baik.

2. Beberapa responden tidak serius dalam mengisi kuesioner dikarenakan beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman responden dengan pertanyaan kuesioner, responde tergesa-gesa, responden telah dipanggil nomor antrian, responden sedang mengisi formulir dan lain-lain.

3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan kuesioner, diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Achmat, Z. 2010. *Theory of Planned Behavior*, Masihkan Relevan?. Diperoleh dari: <http://zakarija.staff.umm.ac.id/html> Akses: 18 Maret 2019.

Ardhyaksa, Theo K., dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* 3 (4) (2014).

Ajzen, I. (1988). from intentions to actions: attitudes,

- personality, & behavior.
Chicago: Dorsey Press
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol 5, pp. 179-211*
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior. New York. USA: Open University Press.*
- Ardian, R. N dan Pratomo. (2012). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Oleh Wajib pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *E-proceeding of management* : Vol.2, No.3 Desember 2015
- Ayu, S. D., dan Hastuti. (2009). Persepsi Wajib Pajak Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi). *Kajian akuntansi. Volume 1, Nomor 1, Februari 2009.*
- Ayu, S.D, (2011). *Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Mela=kukan Perlawanan Pajak. Jurnal Seri Kajian Ilmiah Vol. 14 No. 1,*
- Unika Soegijapranata, Semarang.
- Basri, Y. M., Surya, R. A, S., Fitriasari, Novriyan R., dan Tania, T. S. (2012). Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor yang mempengaruhinya (kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru).
- Duadji, S. (2008). *Selayang Pandang; Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal.* Bandung: Books Terrace & Library.
- Fishbein, M. (2008). A Reasoned Action Approach To health Promotion. *Med Decis Making* 28: 834-844.
- Friskianti, Yossi. Dan Handayani (2014). “Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion”. *Accounting Analysis Journal* 3 (4) (2014)
- Ghozali, Imam. (2006). Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: BP Undip
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Dara Kariena. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kepatuhan, dan Pemahaman Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika

- Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayat dan Nugroho. (2010). "Studi Empiris Theory Of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, no. 2, November 2010: 82-93*
- Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. ". *ISSN:2337-4349*
- Lim, YD. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance* 35, 456–470.
- Luthans, F (2006). *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- Marhaini. (2008). Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Komputer Merek Acer (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara). *Jurnal Manajemen Bisnis. Volume 1, No. 3 September 2008. ISSN: 1978-8339*
- Maryani, T. dan U. Ludigdo. (2010). Survei Atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. *TEMA. Volume II Nomor 1. Maret. Hal: 49-62.*
- Mas'ud, Muchlis. (2012). Pengaruh Sikap, Norma-norma Subyektif dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Nasabah Bank Terhadap Keinginan Untuk Menggunakan Automatic Teller Machine (ATM) Bank BCA di Kota Malang. Universitas Widyagama Malang. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*
- Mengapa Masyarakat Enggan Bayar Pajak?. Online. <http://www.RIMANews.com> (diunduh 13/11/2013).
- Meutia, I., Mukhtaruddin, dan Saputra, D. (2013). Taxpayer Compliance in Tax Filling at Palembang City. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.*
- Mustikasari, Elia, (2007), Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- Nickerson, Inge., Pleshko dan McGee: 2009, *Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1. 2009.*
- Nickerson, Pleshko, dan McGee. 2009. *Presenting The Dimensionality Of An Ethics Scale Pertaining To Tax Evasion. Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues Vol. 12 No. 1, Florida National University.*

- Nugroho, A. (2012). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual capital Disclosure”. *Accounting Analysis journal* . 1 (2)
- Oh, Teik Hai and Lim, Meng See. (2011). Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole Proprietors in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 6.
- Pangestu, F., dan Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa. *SNA* 15 .
- Permatasari, I. (2013). “Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013*
- Pratiwi, Anggi. (2017). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2015. <https://peraturanpajak.com/2017/10/30/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-25pj2015/>. Diakses tanggal 28 Oktober 2018
- Rahayu, S. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, I. S. (2013). “ Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rotter, J. B. (1966). *Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement*. *Journal of Psychological Monographs: General and Applied*. Vol. 80 No. 1 (h. 1 – 14).
- Pulungan, R. H. (2015). “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. *jom. FEKON* Vol. 2 No. 1
- Salip dan Wato. (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4, 2 : 61-81.
- Sari, Wiolda Permata. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON* Vol.2 No.2. Pekanbaru: Faculty of Economics Riau University.
- Setiawan, P.E dan Mualiari, N. K. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib

- Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2*.
- Silaen, Charles et al (2015). “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan, terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. *Jurnal FEKON, Vol 2, No 2*
- Soemitro, R.H. (1988). “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sukrisno, A. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat: Jakarta Selatan.
- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Syahrina, Alifia dan Pratomo, Budi. (2014). “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak”. Bandung: Universitas Telkom
- Tafsir.Surat At Taubah Ayat 29. <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-29>. Diakses 23 Oktober 2018.
- Tjahono, Mochammad Bayu. (2018). Pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan. <http://www.pajak.go.id/article/pemanfaatan-teknologi-untuk-pelayanan>. Diakses pada 23 Oktober 2018.
- Wahyuningsih, Dian Tri. (2014). “Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.”. *Skripsi*, Semarang, Universitas Dian Nuswantoro.
- Wallschutzky, I. (1985). ‘Taxpayer Attitudes to Tax Avoidance and Evasion’. Research Study No 1, *Australian Tax Research Foundation*.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Wanarta, F.E. Yenny Mangonting. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1*